

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Natsir dan Nurcholis sama-sama melihat Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna. Latar belakang pendidikan keduanya yang hampir sama pernah menempuh pendidikan madrasah (pesantren) dan pendidikan umum (Barat) tercermin dalam pemikiran kedua tokoh tersebut dalam menafsirkan doktrin pandangan elastis dan fleksibel. Keduanya memandang bahwa pelaksanaan ajaran Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Tetapi pendekatan keduanya dalam menafsirkan doktrin Islam dalam kehidupan praktis mempunyai kecenderungan yang berbeda. Natsir lebih cenderung menafsirkan doktrin sosial politik Islam dengan menekankan penerapan Islam secara formal dalam kehidupan negara untuk menjamin terlaksananya nilai-nilai Islam tersebut. Sementara Nurcholis lebih menekankan penerapan ajaran Islam disesuaikan dengan konteks lokalitas keindonesiaan yang plural dengan lebih mengutamakan aspek substansi dari ajaran Islam itu.

Kedua titik tolak pemikiran ini, dalam kajian politik Islam kontemporer sering dikategorikan sebagai pemikiran legalistik-formalistik dan substansialistik. Natsir dapat dikategorikan sebagai sosok dari tokoh modernisme politik Islam yang bercorak legalistik-formalisistik, sementara

Nurcholis dapat digolongkan sebagai tokoh neo-modernisme politik Islam yang bercorak substansialis.

Natsir yang pemikirannya bercorak legalistik formalistik memandang Islam sebagai ideologi. Konsekuensinya, Negara berdasarkan Islam secara formal harus diwujudkan. Natsir berkeyakinan bahwa negara sebagai kekuatan eksekutif mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum dan menjamin terbentuknya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan yang dicita-citakan Islam. Dalam hal ini negara berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang telah ada. Tanpa adanya negara sulit diharapkan ketaatan pada hukum-hukum itu. Dengan demikian pendekatan Natsir terhadap pelaksanaan Syariat atau hukum-hukum Islam dalam masyarakat menekankan pada pendekatan formal. Artinya, ia menganggap perlu adanya kekuatan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya yang diperlukan dalam batas-batas tertentu, memaksa individu untuk patuh dan taat pada hukum-hukum yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pandangan Nurcholis Madjid yang pemikirannya bercorak substansialistik berkeyakinan bahwa Islam sebagai sumber etika. Sepanjang negara sejalan dengan pesan Islam yang universal, apa pun bentuk negara tersebut tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak atau menentangnya. Menurutnya, hal yang paling penting menyangkut keberadaan negara adalah substansinya sebagai institusi sehingga pesan-pesan Islam dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks lokal yang ada. Dengan demikian, umat Islam telah turut mengimplementasikan pesan-pesan Islam sebagai agama

rahmatan lil 'alamain. Islam tidak hanya memberikan manfaat kepada umat Islam sendiri melainkan untuk seluruh umat manusia. Konsekuensi dari pemikirannya ini, Nurcholis lebih memilih Indonesia berbentuk negara nasional (*nation-state*) yang berdasarkan Pancasila bukan Negara Islam. Menurutnya Negara Islam dalam arti formal tidak ada dalam sunnah Nabi sehingga tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk memperjuangkannya. Perjuangan mendirikan Negara Islam merupakan gejala modern sebagai apologi terhadap ideologi-ideologi Barat sebagaimana adanya negara-negara Liberal, Sosialis, dan Komunis.

Pandangan Natsir dan Nurcholis tentang nasionalisme, demokrasi, dan musyawarah menunjukkan hal yang positif. Keduanya menerima konsep negara nasional (*nation state*) kendati berbeda menyangkut dasar negaranya. Natsir lebih memilih bentuk negara nasional berdasarkan Islam, sementara Nurcholis memilih negara nasional berdasarkan Pancasila. Keduanya menilai demokrasi dan musyawarah sebagai unsur penting dalam sistem kenegaraan versinya masing-masing.

Pandangan Natsir tentang Pancasila menunjukkan pergeseran. Hal ini terlihat pada awal kemerdekaan, sikap Natsir menerima dasar negara Pancasila sepanjang hakikat inti di dalamnya tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya pada Sidang Konstituante (1957) yang membahas dasar negara, ia menolak Pancasila yang dinilainya netral dan sekuler. Natsir juga menyatakan penolakannya ketika pemerintahan Orde Baru memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi politik, sosial, dan kemasyarakatan.

Pandangan Nurcholis lebih cenderung konsisten dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara. Ia mengkomparasikan Pancasila dengan Piagam Madinah yang merupakan dokumen politik pertama pada masa Rasulullah SAW. yang menaungi masyarakat di Madinah yang plural. Oleh karena itu, ia merasa tidak khawatir ketika pemerintahan Orde Baru memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Ia berusaha menempatkan Pancasila di dalam Islam dan sebaliknya memposisikan Islam dalam konteks sistem yang didasarkan atas Pancasila.

Pandangan Natsir tentang Partai Islam tercermin dari aktifitasnya sebagai Ketua Umum Masyumi (1949-1958). Bagi Natsir, Masyumi merupakan alat dan mesin politik untuk melaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Sejak awal didirikannya Masyumi bercita-cita menjadikan Republik Indonesia yang berlandaskan Islam. Dalam mencapai cita-cita partai tersebut, Natsir menentukan garis perjuangan partai yang meliputi tiga aspek, yaitu: parlementer, pemerintahan, dan pembinaan umat.

Nurcholis menolak simbolisme Islam yang dilekatkan kepada lembaga politik. Menurutnya, hal ini hanya akan mereduksi dan membatasi Islam sebagai sumber etika dan inspirasi bagi kaum Muslimin. Tidak mengherankan kalau kemudian ia menolak Partai Islam dengan Jargonnya yang terkenal: Islam Yes, Partai Islam No. Menurutnya jumlah umat Islam di negeri ini jauh lebih besar daripada jumlah mereka yang mau berpolitik di bawah bendera Islam. Ia menegaskan tidak ada lagi partai yang memperjuangkan

Negara Islam, tetapi agama sebagai sumber inspirasi dan aspirasi akan tetap ada.

Sebagai tokoh intelektual muslim, pemikiran Mohammad Natsir dan Nurcholis Madjid memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dinamika sosial politik di Indonesia. Pemikiran Natsir yang teguh memperjuangkan Islam sebagai dasar negara sangat relevan dengan kondisi politik waktu itu. Sikapnya itu dilakukan sebagai perimbangan kekuatan dengan kekuatan kaum sekuler dan Komunis. Hal ini juga didukung oleh suasana demokrasi yang memberikan ruang bagi berbagai kelompok termasuk politisi Islam untuk memperjuangkan aspirasinya sebelum diakhiri oleh Dekrit Soekarno. Pemikiran Natsir memiliki pengaruh besar dalam Masyumi yang terbukti selama sidang Konstituante memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Demikian juga dengan Nurcholis Madjid, pemikirannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru tidak memberi kesempatan terhadap Islam politik untuk berkembang dan kembali memperjuangkan cita-citanya menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tindakan pemerintah sangat represif bagi siapa pun yang dianggap dapat merobohkan landasan nasional negara, Pancasila. Tragedi Tanjung Priok merupakan salah contoh tindakan represif Orde Baru bagi yang berani menentang pemerintah. Melihat kondisi tersebut, pemikiran Nurcholis Madjid memberi format baru bagi kaum Muslimin untuk tetap aktif berpartisipasi dalam pembangunan tanpa kehilangan idealismenya sebagai seorang muslim.

Dengan demikian pemikiran Nurcholis sangat relevan dengan kondisi zaman waktu itu.

Pada era sekarang ini, pemikiran kedua tokoh tersebut dilanjutkan oleh para generasi pewarisnya. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang giat mengirimkan banyak da'í ke berbagai pelosok tanah air dalam rangka pembinaan umat, juga aktif menyuarakan penerapan syari'at Islam. Begitu pula dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan tokohnya Yusril Ihza Mahendra dengan terang-terangan menyuarakan penerapan syariat Islam dalam negara merupakan cerminan dari pemikiran Natsir dan Masyumi.

Pemikiran Nurcholis Madjid memiliki pengaruh besar semasa kepemimpinannya di HMI yang melahirkan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI. Buku-buku Nurcholis juga sering menjadi rujukan bagi aktifis HMI dalam pergerakannya. Sedangkan Yayasan Paramadina yang didirikannya hingga kini terus aktif menggalang dan melakukan kajian seputar keislaman dalam Klub Kajian Agama (KKA) turut melestarikan dan mengembangkan pemikiran Nurcholis Madjid. Generasi pewarisnya seperti: Komarudin Hidayat, Fachri Ali, Azyumardi Azra, Bahtiar Effendy, Badri Yatim, Hadimulyo, Irchamni Sulaiman, Ali Muhanif, Ihsan Ali Fauzi, Ahmadi Taha, Nanang Tahqiq, Saiful Muzani, Muhammad Wahyuni Nafis dan Narsullah Ali Fauzi hingga kini aktif menyuarakan dan mengembangkan pemikiran Nurcholis Madjid.

Dikaitkan dengan corak pemikiran legalistik-formalistik dan substansialistik, maka kedua pemikiran ini akan selalu bersaing dalam menjawab

realita zaman yang berkembang baik masa sekarang maupun yang akan datang. Kemunculan Perda Syari'ah yang diusung oleh kelompok legalis-formalis serta penentangannya dari kelompok substansialis menunjukkan realita tersebut. Pemikiran mana yang kemudian relevan dan dapat diterima publik sepertinya harus menunggu perjalanan sejarah untuk menentukannya.

B. Saran

Berdasarkan kajian komparasi pemikiran Mohammad Natsir dan Nurcholis Madjid tentang hubungan antara Islam dengan politik negara, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kajian tentang pemikiran politik Islam di Indonesia baik perseorangan maupun kelompok perlu terus dikembangkan sebagai sarana dalam memperkaya khazanah intelektual di negeri ini. Dalam hal ini Jurusan Pendidikan Sejarah dapat mendorong mahasiswa untuk terus melakukan penelitian ke arah sana.
2. Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah yang hendak melanjutkan dan mengembangkan konten kajian dalam skripsi ini, masih terbuka untuk mengkaji secara mendalam tentang Pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal oleh pemerintah Orde Baru berikut pemikiran, proses dan reaksinya. Kajian tentang aspek lain tentang pemikiran Mohammad Natsir dan Nurcholis Madjid (misalnya: pendidikan) juga perlu dikaji secara mendalam untuk memperoleh gambaran komprehensif sebagai referensi solusi terhadap permasalahan di negeri ini.